

Kebudayaan di Bawah Teknokrasi

* Sebuah Otokritik Kebudayaan

DILANTIKNYA seorang teknokrat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilaporkan media massa telah membangkitkan kererasan sebagian kalangan. Dikhawatirkan, kalau-kalau kegiatan kebudayaan akan tersisih oleh galaknya kemajuan teknologi dan industri.

Kerasahan demikian bukan saja berlebihan, tetapi menyesatkan. Walaupun begitu, kegelisahan itu pantas diperhatikan dan dikaji, karena ia mengangkat ke permukaan sejumlah persoalan kebudayaan yang serius. Ia memperjelas apa yang tak beres dalam kebudayaan kita, namun sementara ini lebih banyak tersisih atau tersembunyi.

Memilah sebab dan akibat

Dengan penalaran sederhana saja kita sudah bisa menggugat kegelisahan di atas. Kegelisahan itu menempatkan peristiwa pelantikan si teknokrat sebagai calon/potensi penyebab merosotnya dunia kebudayaan. Mengapa bukan sebaliknya? Mengapa pelantikan itu tidak dilihat justru sebagai akibat sudah merosotnya dinamika kebudayaan dan majunya teknokrasi Indonesia?

Artinya, pelantikan si teknokrat tidak bertanggung jawab atas kemerosotan kebudayaan kita. Justru sebaliknya, kemerosotan budaya kitalah yang bertanggung jawab atas terjadinya teknokrasi (kekuasaan logika dan kelompok ilmuwan teknologi) di Indonesia.

Tulisan ini bukanlah sebuah

pembelaan atau apologia bagi seorang teknokrat ataupun teknokrasi secara menyeluruh. Hal ini akan lebih jelas dalam uraian di bawah. Tetapi memang tulisan ini dimaksudkan sebagai otokritik bagi pencinta dunia "kebudayaan".

Humanisme dan Individualisme

Persoalan kedua yang dapat disebut dari kegelisahan atas pelantikan menteri teknokrat itu adalah kuatnya pengaruh filsafat Humanisme dan Individualisme dalam kebudayaan kaum elit kita.

Humanisme maupun Individualisme dalam masyarakat kita bersumber dari filsafat Eropa dari abad-abad lampau, yang masih kuat hingga pertengahan abad ini. Keduanya menyusup dalam pikiran dan tata-sosial kita lewat kolonialisme Eropa.

Ironisnya, sementara kini keduanya sudah basi di negeri-negeri bekas penjajah, isme-isme itu masih kokoh di negeri bekas jajahan yang mengaku sudah merdeka.

Humanisme merupakan paham yang menekankan Manusia (dengan huruf besar M) sebagai pusat jagat raya dan seluruh gerak sejarah. Menurut paham ini, dunia akan baik bila dihuni oleh Manusia yang baik. Karena itu, jika kehidupan dunia ternyata tidak beres, maka Manusia lah yang dipersalahkan. Perbaikan dilakukan dengan membenahi akal-budi dan moralitas Manusia-

nya.

Individualisme bangkit pada masa kemudian, bersamaan dengan mekarnya Kapitalisme yang menekankan hak milik pribadi dan obyektivasi nilai

me dan Individualisme. Kegelisahan itu timbul akibat kepercayaan yang berlebihan pada kekuasaan seorang manusia yang kebetulan seorang teknokrat. Seakan-akan ia begitu menentukan dinamika sosial seluas dan kompleks Indonesia.

Di negeri asalnya (Eropa), Humanisme dan Individualisme tampil sebagai revolusi pembebasan manusia dari kungkungan ketat kolaborasi antara gereja dan kekuasaan negara. Tapi, seperti halnya semua pahlawan pembebas, dalam perkembangannya Humanisme maupun Individualisme dipuji berlebihan. Sejak awal abad ini, Humanisme ditumbangkan oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial modern yang menemukan "struktur sosial" sebagai pusat dan sejarah sosial umat manusia. Maka, Struktural-

Ariel Heryanto

isme menggeser Humanisme.

Sejumlah aliran filsafat mutakhir (pasca 1960-an) menelanjangi ideologi dan misrepresentasi di balik pengertian Manusia ("human" pada istilah "Humanisme"). Istilah itu ternyata tidak universal, apalagi adil. Ia hanya mengacu pada manusia tertentu saja: berkulit putih, lelaki, beragama Nasrani. Yakni spesies yang menjadi penguasa tata-dunia modern.

Kegelisahan di Indonesia pada minggu-minggu belakangan atas pelantikan seorang menteri dapat ditempatkan dalam kerangka pemahaman Humanis-

me dan Individualisme. Kegelisahan itu timbul akibat kepercayaan yang berlebihan pada kekuasaan seorang manusia yang kebetulan seorang teknokrat. Seakan-akan ia begitu menentukan dinamika sosial seluas dan kompleks Indonesia.

Jangankan seorang menteri. Bahkan kekuasaan nyata seorang presiden dari negeri macam apa pun (otoriter atau adikauasa), bukan tak-terbatas. Orang Indonesia terlalu dimabuk Humanisme tentang kekuatan seorang manusia. Itu pula sebabnya kesenian Indonesia terkungkung oleh romantisme figuri seniman sebagai individu yang dianggap otonom, unik dan kreatif. Romantisme ini bangkit di Eropa abad XVIII, masuk ke Hindia Belanda awal abad ini. Kini sudah bangkrut di negeri asalnya, tapi segar-segar di sini.

Kebudayaan produk orientalisme

Uraian di atas menunjukkan macetnya pemikiran kebudayaan dalam masyarakat kita. Apakah aneh jika kebudayaan kita kedodoran menghadapi gejolak teknologi dan industri Indonesia, yang dipacu deras oleh negeri-negeri bekas penjajah?

Keterbelakangan dalam lapangan kebudayaan kita tampak secara lebih mendasar dalam pokok-pokok pemikiran yang masih dominan tentang hakikat "kebudayaan" itu sendiri. Menurut pemikiran dominan dalam masyarakat kita, "kebudayaan"

adalah sesuatu yang berada atau bersumber di luar dirinya. Kebudayaan hanya ada dan tinggal bersama masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat.

Seakan-akan ada subyek (manusia Indonesia) di satu pihak yang menjadi pengamat/peneliti kebudayaan. Dan di pihak lain, ada kebudayaan sebagai obyek pengamatan/penelitiannya. Kebudayaan dianggap sebagai suatu benda atau realitas non-material (nilai, gagasan, gejala atau dinamika spiritual) yang bisa di-benda-kan: dibicarakan sebagai tanda-tanda iman dan jinak atau misterius.

Secara ekstrem, bahkan ada banyak yang menganggap "kebudayaan" menempati suatu wilayah khusus. Ada pusat-pusat kebudayaan. Ada orang-orang tertentu yang disebut "budawan". Bahkan belakangan ini ada yang dijuluki pekerja/pelaku budaya. Mungkin tidak semua orang setuju dengan istilah-istilah itu. Namun sangat sedikit yang merasa terganggu olehnya. Mereka yang tinggal di "lokalisasi" kebudayaan inilah yang belakangan diwawancara sebagai juri bicara pembela kebudayaan menghadapi kemungkinan dampak pelantikan seorang teknokrat sebagai menteri kebudayaan.

Sebagaimana halnya teknologi dan industri, "kebudayaan" kita adalah dampak imperialisme ekonomi dan militer Barat yang tak terelakkan. Bedanya, teknologi dan industri memiliki vitalitas transformasi internal dan agresivitas eksternal luar biasa.

Sedang kebudayaan masih belum banyak beranjak dari apa yang diwariskan kolonialisme Eropa awal abad ini.

Konsep dasar kebudayaan yang dominan di Indonesia merupakan produk ilmu-pengetahuan orientalis asing. Salah satu wujudnya: banyak di antara kita yang masih memaham-biak pertentangan esensi budaya Timur versus Barat. Dikotomi ini bikinan para sarjana kolonial. Ironisnya, produk pengetahuan Barat ini kini banyak digunakan priyayi Timur sebagai senjata "prabumi" untuk menampik atau mengejek "unsur-unsur negatif" kebudayaan Barat.

Kebudayaan vs teknokrasi

Kritik terhadap kemacetan kebudayaan mutakhir kita belum lengkap jika tidak disertai dengan menunjuk pada reifikasi yang terlanjur dominan. Kebudayaan dibicarakan sebagai sesuatu yang di awang-awang. Tidak terkait dengan realitas sehari-hari secara konkret. Studi kebudayaan (seperti dalam berbagai teks kuliah IBD di banyak universitas) mirip dengan ilmu mistik.

Dalam bentuknya yang mistis pada reifikasi, "kebudayaan" dipertentangkan dengan "teknologi" atau "industri". Seakan-akan masing-masing otonom. Seakan-akan masing-masing punya esensi sendiri-sendiri, seperti halnya "kepriadian Timur" yang dipertentangkan dengan "kepriadian Barat".

Yang dikhayalkan sebagai esensi kebudayaan adalah keper-

kaan, moralitas dan sopan santun, irasionalitas, estetika, kebijaksanaan serta berbagai nilai-nilai "luhur dan adiluhung". Singkatnya, nilai ideal Humanisme kaum orientalis. Teknologi atau industri dikhayalkan (direifikasi) punya watak esensial sendiri: ketegasan, ketepatan, efisiensi, rasionalitas, kemajuan, dsb.

Sudah saatnya kita bertanya: benarkah kebudayaan punya esensi? Transendental, ahistoris, dan universal? Sehingga perlu selalu dibela bila terancam oleh kekuatan lain (misalnya teknokrasi)? Apakah semua kebudayaan secara esensial bertentangan dengan teknokrasi? Tidakkah justru ada banyak konsep dan praktik kebudayaan yang mengabdi pada kekuasaan, bersama teknologi dan industri? Kebudayaan seperti itu berwatak seperti teknokrasi: memuliakan kesatuan (anti-kemajemukan) dan stabilitas (anti-perubahan). Kebudayaan seperti itu anti pada puisi *mbeling*, filsafat pasca-modern, atau bahasa *proken* dan *plesetan*.

Kebudayaan yang merongrong cita-cita kemerdekaan bangsa ini tak pantas dibela.

Kebudayaan yang macet tak punya sumbangsih pada bangsa ini. Ia memang pantas dilecehkan dan dikritik. Tapi jangan berharap kritik yang bermutu akan datang dari teknokrat.***

***Ariel Heryanto, staf pengajar pada Program Pascasarjana UK Satya Wacana, Salatiga; dan kandidat doktor pada Monash University, Australia.**